

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Latief dan Hasbi Ali, 2010, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori PERadilan (Judicialprudence)* KEncana Prenada Media Group, Jakarta.
- Adam Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing , Malang.
- Adam Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni Bandung, Jakarta.
- Ahmad Muliadi, 2013, *Politik Hukum*, Akademika, Padang.
- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan dengan Beberapa Negara*, Universitas Trisaksi, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*,: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Anshoruddin, 2014, *Hukum pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Anti-corruption tool kit*, Chapter 5,Enforcement, cicp 15 (unodc.org)
- Arif Sritua, 1986, *Korupsi*, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta.
- Astika Nurul Hidayah, 2018, *Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi*, Jurnal Kosmik Hukum.
- Baharudin Lopa, 1987, *UU PTPK Berikut Pembahasan Serta Penerapannya Dalam Praktek*, Alumni Bandung.

- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk Ketiga, Citra Aditya, Bandung.
- Bentham, J., 1996, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1780/89)*, ed. JH Burns and HLA Hart, introd. F. Rosen. Oxford.
- Budi Sutedjo Dharma Oetomo, 2002, *Perancangan & Pengembangan Sistem Informasi*, Remaja Rosda Karya, Yogyakarta.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi, Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Connelly, J., 2012, *Delaware General Corporations Law 102 and Bentham's Utilitarian Calculus: The Greatest Good for the Greatest Number'of Corporate Stakeholders*. Available at SSRN 2079685.
- Danim, Sudarwan, 2008, *Media Komunikasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji, 2002, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Deni Darmawan, 2012, *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Djaja S. Meliala, 1977, *Hukum di Amerika Serikat, Suatu Studi Perbandingan*, Tarsito, Bandung
- Dr. Reda Manthovani, SH., LLM, 2015, *Penyadapan VS Privasi*, 2015, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Drew, B. T., González-Gallegos, J. G., Xiang, C. L., Kriebel, R., Drummond, C. P., Walked, J. B., & Sytsma, K. J. 2017. Salvia united: The greatest good for the greatest number. *Taxon*,
- Dur Asmani, 2011, *Tips Efektif Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Dunia Pendidikan*, Diva Press, Yogyakarta.
- E. Utrech, 1986, *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya.
- Edman Makarim, 2015, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Edward A. Tomlinson, *The Saga of Wiretapping in France: What It Tells Us About the French Criminal Justice System*, Louisiana, 1993
- Fatah Syukur NC, 2008, *Teknologi Pendidikan*,: Rasai Media Group, Semarang..
- Gény, F. 1921. *Science et technique en droit privé positif: nouvelle contribution à la critique de la méthode juridique* (Vol. 3). Sirey
- Gorys Keraf, D, 2009, *Diksi Dan Gaya Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama.
- H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1988, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV.
- Hans Kelsen, 1991. *General Theory Of Law And State*, Translate By Anders Wedberg, New York: Russel And Russel, Dikutip Dari Jimly Ashidique Dan M Ali Safa'at, 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Ctk. Kedua , Konstitusi Press, Jakarta.
- Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta. 2002.
- Hendri, H., 2020, *Implementasi Hak Cipta Dalam Hubungannya Dengan Tujuan Hukum Doctrinal*,
- Henry Pandapotan Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*, PT Alumni, 2012, Bandung.
- Herbert L Packer. 1968. *The Limits Of The Criminal Sanction*, Stanford University Press.
- Hidayat, U. 2016. *Negara hukum dan politik hukum Islam di Indonesia: Catatan kritis atas pemikiran Nurcholish Madjid*. Asy-Syari'ah
- Himpunan bujuklap, bujuklap, bujukmin, 1990, *Proses penyidikan tindak pidana*, Jakarta.
- IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta, Total Media
- Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, 2013, *Dasar-Dasar Politik Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta.

- Istiawati, S., 2013, *Partai Politik Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Eksistensi Dan Pengaruhnya Dalam Pembuatan Hukum. PERSPEKTIF*
- Jenny Barmawi, 1989, *Perbandingan hukum Belanda dalam hukum kontinental dan hukum Inggris Amerika*, Pusaka Kartini, Yogyakarta.
- Jeremy Bentham, 1972, "*Utility And Punishment*", Dalam *Philosophical Perspective On Punishment*. Editor Gertrude Ezorsky, State University Of New York Press Albany,.
- Joseph Raz, 1979, *The Rule of Law and Its Virtue, in the Authority of Law* (Oxford) Clarendon Press.
- Kadir, Abdul dan Terra Ch., Triwahyuni, 2008, *Pengenalan Teknologi Informasi*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
- Kamus besar bahasa Indonesia. 2002, Balai pustaka, Jakarta.
- Kusmanto, K. 2016. *Peran Dan Tanggungjawab Ppat Bagi Terciptanya Kepastian Hukum Tanah Hak Ulayat Di Papua* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).
- Kusumah M.W, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kusumohamidjojo, B., 2016., *Ketertiban yang adil versus ketidakadilan: beban sosial-ekonomi yang historis dari hukum*, Veritas et Justitia.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Latifah, K. 2013, *Faktor penyebab tingginya cerai gugat berdasarkan usia perkawinan di Pengadilan Agama Malang*, Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Law community, *Tinjauan Yuridis Mengenai peranan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia*, wonkdermayu.wordpress.com, (diakses pada tanggal 20 Juni 2020).
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Husein Harun, 1991, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT. Reneka Cipta, Jakarta.
- Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, 2016, Yogyakarta.

- Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi Dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI- Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Michael Doherty, *Textbook Jurisprudence : The Philosophy Of Law*, Old Bailey Press, London 1997
- Moh. Mahfud MD, 2011, *Membangun politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mohammad Amari, 2013, *Politik Penegakan HUKUM Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Solusi Publising, Jakarta.
- Monang Siahaan, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokraksi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, S. H. 2003. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. Citra Aditya Bakti.
- Nana Sudjana dan Ahmad Rifai, 1989, *Teknologi Pengajaran*,: Sinar Baru, Bandung.
- Nasution, B. J. 2017. *Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran*
- Noel B Reynolds, 1989, *Grounding the Rule of Law, Vol 2 Ratio Juris 1*.
- OC Kaligis, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.
- Oxford Pro Bono Publico, 2014, *Privacy Rights in the Digital Age*, New York: American Civil Liberties Union
- Paul Kennedy, *Annual Report of the Interception of Communication Commissioner*, The Stationery Office Limited, London.
- Philipus M. Hadjon, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998.
- Pim Van Stam, 2010, *Lawfull Interception in Practice in Netherland*, Cyprus.
- Police can intercept communications if there is illegal element, 2014, *Police can intercept communications if there is illegal element (nst.com.my)*.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 29.
- Pratasis, S. O., 2014. *Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHP*.
- Purwanto, P. 2017. Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan. *Jurnal Hukum Media Bhakti*.
- Putri, A. R. H., & Arifin, R. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)*. Res Judicata,
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, 2013, Bogor
- R. Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Subekti, 2015, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Reda Manthovani, *Penyadapan VS Privasi*, 2015 PT. Bhuana Ilmu Populer
- René de Groot, Gerard, *Doeleinden en techniek der rechtsvergelijking*, *Rijksuniversiteit Limburg*.
- Ridwan, 2003, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta.
- RIPA S 2623
- Robert B Seidman, 1972, *Law Order And Power*, Addition Publishing Company Wesley Reading Massachusett.
- Rusman dkk, 2011, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Salim,H.S Dan Erlis Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Edisi Pertama, Ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.
- Sanisol, M. 2018. *Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Di Kota Padang*. (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Sasangka and Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*.
- Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta.
- Setiawan, B., 2018. Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*.
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Perbandingan hukum*, Melati, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1996, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung.
- Soleman B Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Stone, P., 1929, *The Greatest Good of the Greatest Number*. Miss.
- Sudi Yatmana, 2007, *Untaian 1000 Kata Bijak*, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta.
- Sunarjati Hartono, 1988, *Kapita selekta perbandingan hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunarto, S., 2016, Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif. *Masalah-Masalah Hukum*.
- Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*,: Refika Aditama, Bandung.
- Telecommunications Interception and Other Legislation Amendment Bill*, 2003, Parliament of Australia (aph.gov.au), Date Introduced: 18 September 2003, House: House of Representatives, Portfolio: Attorney-General

- Thomas Wong, 2005, *Regulation of Interception of Communication in Selected Jurisdictions Hongkong Research and Library Services Division Legislative Council Secretariat.*
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,: Balai Pustaka, Cet.III, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Utrecht, 1986, *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cetakan ke-10 Sumur Bandung, Bandung
- Zainal Arifin Dan Adhi Setiyawan, 2012, *Pengembangan Pembelajaran Aktif Dengan ICT*, T. Skripta Media Creative, Yogyakarta.
- Zainuddin Ali, 2014, *Sosiologi Hukum*, sinar Grafika, Jakarta

JURNAL DAN MAKALAH

- Benny Bryandoro, 2021, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi *Legalitas Penyadapan oleh Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan, Jakarta.
- Sari, L., 2012, *Hakekat Keadilan Dalam Hukum*. Legal Pluralism: Journal of Law Science.
- Sari, L., 2012, *Hakekat Keadilan Dalam Hukum*. Legal Pluralism: Journal of Law Science.
- Rasyid, A., 2011, *Konseptualisasi Etika dalam Politik: Perspektif Komunikasi Islami*, Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies.
- Rizal, A., 2015, *Kajian Kritis tentang Cita Keadilan: Suatu Pendahuluan Filosofi Hukum terhadap Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Yuridis*. Padjadjaran Journal of Law,
- Putu Ariesta Wiryawan dan Made Tjatrayasa, 2016, *Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*, *Open Journal Systems*, Vol. 05, No. 02.
- Masidin, M. 2019. *Pandangan Terhadap Rencana Revisi Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. National Journal of Law.

- Lihat Juga, Bukit, A. N., Ginting, B., Tarigan, P., & Nasution, F. A. 2014. Analisis Hukum Peraturan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah Menurut Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Studi Penerimaan Pns di Pemko Medan). *USU Law Journal*,
- Eddison, R., 1966, *The greatest good of the greatest number*. Journal of the Operational Research Society
- Bukit, A. N., Ginting, B., Tarigan, P., & Nasution, F. A., 2014, *Analisis Hukum Peraturan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah Menurut Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Studi Penerimaan Pns di Pemko Medan)*, *USU Law Journal*.
- Fathoni, M. A. 2018. Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Proses Pembagian Waris Anak Angkat. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Fauzan, M., & Yunus, I, 2018, Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 34/Pdt. G/Pn-Bna. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*,
- Harahap, D. R. S., Suherman, S., & Aryanti, D. 2017, *Gagasan Pengaturan Penjatuhan Sanksi Pidana Dengan Berorientasi Pada Korban*, *Jurnal Yuridis*
- Harahap, D. Supriyanta, S., 2008, *Demokratisasi dalam Penegakan Hukum*, *Jurnal Wacana Hukum*
- Ida Bagus Ketut Weda, 2013, *Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya Untuk Pembangunan di Indonesia*, *Jurnal Advokasi*, Vol. 3, No. 2.
- Lihat Juga, Mediawati, N. F., 2013, *Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Dilematis. Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*,
- Maryanto, 2012, *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II, No. 2.
- Mulyana, D., 2019, *Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif*. *Jurnal Wawasan Yuridika*.
- Murdiana, E. 2016. Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (Bmt) Sebagai Koperasi Syari'ah Dalam Bingkai Ius Constituendum. *Jurnal Penelitian*, 10(2), 279-280. Lihat Juga, Sujasmin, S. 2014. Kedudukan Pancasila Dalam

Politik Hukum Indonesia Menuju Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare Staat). *Jurnal Wawasan Yuridika*.

Nasution, B. J., 2014, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, *Yustisia Jurnal Hukum*

Nasution, B. J., 2017, *Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*

Pakendek, A. 2019. *Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila*. *Jurnal Yustitia*.

Pakendek, A., 2019, *Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila*. *Jurnal Yustitia*.

Rahman, M. G., & Tomayahu, S, 2020, *Penegakan Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Al Himayah*

Saputra, A. R., 2012, *Konsep Keadilan Menurut al-Qur'an dan para filosof*. *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*.

Sianturi, K. A, 2017. *Perwujudan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Diversi*. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*

Sujasmin, S. 2014, *Kedudukan Pancasila Dalam Politik Hukum Indonesia Menuju Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare Staat)*. *Jurnal Wawasan Yuridika*.

Sulardi, S., & Wardoyo, Y. P, 2015. *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*. *Jurnal Yudisial*.

Sulardi, S., & Wardoyo, Y. P. 2015. *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*, *Jurnal Yudisial*.

Surya, H., Muhammad, R. A., & Din, M, 2013, *Studi Perbandingan Tentang Konsep Perzinaan Menurut Kuhp Dengan Hukum Pidana Islam*, *Jurnal Ilmu Hukum*

Wijayanta, T., 2014, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, *Jurnal Dinamika Hukum*,

Zamzami, A., 2018, *Keadilan Di Jalan Raya*. *Jurnal Yurispruden*

Wungow, J. 2018, *Indonesianisasi Kristologi Perikemanusiaan Dan Kristologi Aplikasi Sila Kedua Pancasila Dalam Kekristenan*. *RHEMA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika*, 4(2).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KUHP dan KUHPA, 2014, Yogyakarta, Redaksi Bhafana Publishing.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

INTERNET

Bert-Jaap Koops dan Rudi Bekkers, 2007, *Interceptability of Telecommunications Is US and Dutch Law Prepared for the Future Telecommunications Policy* 31, Dikutip dari <http://dx.doi.org/10.1016/j.telpol.2006.11.006>.

<http://bunga-legal.blogspot.com/2010/05/definisi-politik-hukum-dan-politik.html>,
(diakses 14 Februari 2021)

<http://yuhendra.blog Wordpress.com/> 2008 : 07

Laws of Malaysia Act 694 Malaysian anti-corruption commission act 2009.

Lloyd Firth, 2016, *Wiretaps : The Forbidden Fruit*, <https://www.mondaq.com/uk/white-collar-crime-anti-corruption-fraud/464922/wiretaps-the-forbidden-fruit>.

- Renata, 2017, *Penyadapan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b1e3ca>, diakses tanggal 20 Mei 2019.
- www.kpk.go.id, *Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008*, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (kpk.go.id), (diakses tanggal 02 Januari 2021).
- Yading Ariyanto, 2015, *Hak Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali dalam Perspektif Keadilan Hukum Di Indonesia*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1339> (diakses tanggal 2 September 2021).
- Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. No. 3 Desember 2014, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73/57> (diakses tanggal 3 September 2021).
- Diana Tantri Cahyaningsih, *Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot, Rechtsvinding Online*, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/ (diakses 6 Januari 2022).
- Gunarto, *Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum, Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 3 Oktober 2009, <https://jurnal.uqm.ac.id/jmh/article/view/16273> (diakses 28 Agustus 2021).